

Tersedia Online di <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP>  
ISSN Print : 2685-7499 ISSN Online : 2745-8660

## Literature Review : Formulasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Indonesia

**Siti Aminah**

Program Studi Administrasi Publik, Institut Pahlawan 12, Jalan Diponegoro Nomor 16,  
Kec. Sungailiat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33215, Indonesia  
E-mail: [sitiaminahea@gmail.com](mailto:sitiaminahea@gmail.com)

---

Article History:

Received : 27/06/2025  
Received in revised form : 20/07/2025  
Accepted : 01/01/2026

---

**Abstract:** Stunting remains a global issue until now. In Indonesia, the stunting rate is still far from the target of a 14 percent reduction by 2024. According to the Indonesian Health Survey (2023), the national stunting prevalence was 21.5 percent, a decrease of approximately 0.8 percent compared to the previous year. This study focuses on the formulation of policies, strategies, and programs for stunting prevention and management in 10 regions in Indonesia. The objective of the study was to analyze the formulation of stunting prevention and management policies in Indonesia using a literature review-based research method sourced from journals and other research materials. Based on the 10 journals analyzed, the results indicate that several factors must be considered in formulating effective policies to prevent and manage stunting in Indonesia, namely social issues, local potential, multi-sector integration, social capital, and the establishment of regulations and the formation of a Stunting Reduction Acceleration Team. It is hoped that the results of this study can contribute to the formulation of more comprehensive stunting prevention and management policies in Indonesia based on relevant supporting data.

**Keywords:** Stunting, Policy Formulation, Prevention and Control, Indonesia

**Abstrak:** Permasalahan *stunting* masih menjadi isu global hingga saat ini. Di Indonesia, angka *stunting* masih jauh dari target penurunan sebesar 14 persen pada tahun 2024. Menurut Survei Kesehatan Indonesia (2023), prevalensi *stunting* nasional sebesar 21,5 persen, turun sekitar 0,8 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada formulasi kebijakan, strategi, serta program-program pencegahan dan penanggulangan *stunting* pada 10 daerah di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis formulasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Indonesia dengan metode penelitian berbasis *literature review* yang bersumber dari kajian jurnal dan bahan penelitian lainnya. Berdasarkan 10 jurnal yang telah dianalisis, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memformulasikan kebijakan yang efektif untuk mencegah dan menanggulangi *stunting* di Indonesia yaitu masalah sosial, potensi lokal, integrasi multisektor, modal sosial, serta penetapan regulasi dan pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam memformulasikan kebijakan pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Indonesia secara lebih komprehensif berdasarkan data dukung yang relevan.

**Kata kunci:** *Stunting*, Formulasi Kebijakan, Pencegahan dan Penanggulangan, Indonesia

## PENDAHULUAN

Permasalahan *stunting* masih menjadi isu global hingga saat ini. Tahun 2023, *United Nations Children's Fund* (UNICEF) melaporkan bahwa di tahun 2022 terdapat 22,3% atau 148,1 juta balita di seluruh dunia mengalami *stunting*. Secara khusus, di Afrika Sub-Sahara dan Asia Tenggara, prevalensi *stunting* tetap tinggi, dengan angka bervariasi antara 30% hingga 40% (WHO, 2023). Indonesia termasuk dalam keenam negara yang mengalami *stunting* yaitu di wilayah *South-East Asia* setelah Bhutan, Timor Leste, Maldives, Bangladesh, dan India, yakni sebesar 36,4% (Nirmalasari, 2020). Pada tahun 2023, angka prevalensi *stunting* nasional sebesar 21,5 persen, turun sekitar 0,8 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya (Survei Kesehatan Indonesia, 2023).

Pengertian *stunting* dikutip dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Beberapa penyebab *stunting* diantaranya kurangnya asupan gizi seimbang selama kehamilan dan awal kehidupan anak, infeksi kronis, dan sanitasi yang buruk (Nurany, dkk, 2023). Selain itu, penyebab *stunting* lainnya adalah terkait pola asuh dan pendampingan keluarga (Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, 2022). Adapun data prevalensi *stunting* di Indonesia pada tahun 2007-2022 dapat dicermati pada tabel berikut.

**Tabel 1. Prevalensi *Stunting* di Indonesia Pada Tahun 2007-2022**

No	Tahun	Angka
1	2007	36,8
2	2010	35,6
3	2013	37,2
4	2016	34
5	2018	30,8
6	2019	27,7
7	2021	24,4
8	2022	21,6

Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022

Berdasarkan tabel di atas, angka prevalensi *stunting* di Indonesia memang cenderung menurun setiap tahunnya. Namun, angka tersebut masih jauh dari target prevalensi *stunting* di tahun 2024 yakni sebesar 14%. Hal inilah yang menarik minat penulis untuk meneliti lebih lanjut terkait penyebab masih tingginya angka prevalensi *stunting* sekaligus menemukan formulasi kebijakan yang efektif terkait pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Indonesia.

Adapun terkait studi sebelumnya belum ditemukan adanya penelitian sejenis yang mengintegrasikan analisis kebijakan *stunting* berbasis potensi lokal dan modal sosial secara komprehensif dari sedikitnya 10 daerah di Indonesia. Maka penelitian ini dapat menjadi rujukan baru dalam merumuskan kebijakan terkait pencegahan dan penanggulangan *stunting* berdasarkan kondisi riil beberapa daerah di Indonesia khususnya yang telah berhasil menekan angka *stunting*.

Permasalahan *stunting* di Indonesia harus segera dikaji dan ditangani secara serius mengingat besarnya dampak yang diakibatkan terhadap anak Indonesia selaku generasi di masa depan. Dampak *stunting* sendiri dibagi menjadi dua, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, *stunting* menyebabkan terganggunya perkembangan otak, pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan gangguan metabolisme. Sedangkan dalam jangka panjang, *stunting* mengakibatkan mudahnya terkena penyakit, munculnya penyakit diabetes, penyakit jantung dan pembuluh darah, kegemukan, kanker, stroke, disabilitas pada usia tua, dan kualitas kerja yang kurang baik sehingga membuat produktivitas menjadi rendah (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Selain dampak fisiologis, masalah *stunting* juga berdampak besar terhadap kondisi perekonomian di Indonesia. Contohnya, besar rata-rata potensi kerugian ekonomi pada balita *stunting* di 32 provinsi di Indonesia tahun 2013 yaitu Rp 96 miliar-Rp 430 miliar, jika nilai ini dilihat dalam persentase terhadap PDRB maka besar potensi kerugian pada penurunan produktivitas 2% dan 9% yaitu sekitar 0,15-0,67% dari rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan kondisi *stunting* (dengan asumsi tidak adanya perbaikan gizi), selanjutnya akan mempengaruhi jenis pekerjaan yang akan diperoleh, penurunan produktivitas kerja, serta pendapatan yang diterima (Khotimah, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan langkah strategis dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk dapat merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dalam rangka mencegah dan menanggulangi agar *stunting* tidak semakin meluas di Indonesia. Melalui penelitian berbasis *literature review* ini penulis bertujuan untuk menemukan dan mengkaji kembali formulasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Indonesia berdasarkan jurnal-jurnal dan literatur terdahulu yang relevan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode berbasis *literature review* yang merupakan sebuah metodologi penelitian bertujuan untuk mengumpulkan dan mengambil intisari dari penelitian sebelumnya serta menganalisis beberapa *overview* para ahli yang tertulis dalam teks (Snyder,2019). Penulis menganalisis beberapa kajian jurnal secara tematik dengan mengelompokkan temuan berdasarkan faktor kebijakan, strategi, serta program-program pencegahan dan penanggulangan *stunting* pada 10 daerah di Indonesia.

Penulis menggunakan 10 jurnal nasional terakreditasi yang relevan dengan topik penelitian ini dengan rentang waktu terbit 5 tahun terakhir. Cakupan wilayah analisis berfokus pada 10 daerah di Indonesia yang terdiri dari 5 kabupaten/kota yaitu di Kabupaten Banjar, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Halmahera Timur, Kota Padang, Kota Madiun serta 4 kelurahan/desa yakni Desa Batnes (Timor Tengah Utara), Desa Bilebante (Lombok Tengah), Kelurahan Donokerto Turi Sleman (Yogyakarta), Desa Warakas (Jakarta Utara) serta 1 daerah provinsi yakni Provinsi Kalimantan Selatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengertian formulasi kebijakan (*formulation policy*) menurut Dunn (2003) adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah. Formulasi kebijakan publik adalah langkah paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu, apa yang dirumuskan dalam fase ini akan sangat menentukan keberhasilan kebijakan publik yang dibuat untuk masa yang akan datang. Berdasarkan 10 jurnal yang telah dianalisis, maka peneliti mendapatkan kajian terhadap formulasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan *stunting* pada 10 daerah di Indonesia.

Perbandingan seluruh jurnal tersebut dapat diamati dalam Tabel Ekstraksi dari *Literature Review* 10 Jurnal berikut.

**Tabel 2. Ekstraksi dari *Literature Review* 10 Jurnal**

No	Judul	Penulis	Tahun	Metode	Hasil Penelitian
1	Formulasi Model Pemberdayaan Perempuan dalam Mendukung Kebijakan Pencegahan <i>Stunting</i> Berbasis Responsif Gender di Kabupaten Banjar	Yorizal Tri Marzuki Gulo, Budi Suryadi	2023	Empiris	Formulasi kebijakan dengan model pemberdayaan perempuan berbasis responsif gender dengan cara mengelola sumber daya, agensi dan prestasi, optimalisasi peran keluarga, keberadaan kebijakan spesifik gender dan kolaborasi antar stakeholder dapat berkontribusi signifikan terhadap upaya pencegahan <i>stunting</i> di Kabupaten Banjar.
2	Kajian Teoritis: Formulasi Kebijakan Potensi Pertanian dalam Pencegahan <i>Stunting</i> di Kalimantan Selatan	Sidderatul Akbar	2023	Analisis mendasar pada penelitian terdahulu	Formulasi potensi kebijakan pertanian dalam pencegahan <i>stunting</i> di Kalimantan Selatan dapat dilakukan dengan beberapa langkah yaitu diversifikasi pertanian, peningkatan aksesibilitas, pengembangan pertanian berkelanjutan, pendidikan gizi, pengembangan infrastruktur, penggunaan teknologi pertanian, pengembangan industri pangan olahan, program subsidi dan insentif, kolaborasi antar sektor, pemantauan dan evaluasi.
3	Upaya Konvergensi Kebijakan Pencegahan <i>Stunting</i> di Kota Padang	Muhammad Iqbal, Rahmani Yusran	2021	Kualitatif deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konvergensi kebijakan pencegahan <i>stunting</i> di Kota Padang tidak berjalan sesuai dengan tahapan konvergensi.</li> <li>2. Diperlukan kolaborasi seluruh OPD yang terlibat baik itu Dinas Kesehatan yang melaksanakan intervensi gizi spesifik dan OPD di luar Dinas Kesehatan yang terlibat melaksanakan intervensi gizi sensitif</li> </ol>
4	Kebijakan Pencegahan dan Strategi Penanganan <i>Stunting</i> Di Kalurahan	Ari Retno Purwanti, Titik Mulat Widyas	2022	Kualitatif deskriptif	Kebijakan pencegahan dan strategi penanganan <i>stunting</i> dilakukan dengan penyuluhan oleh kader-kader yang sudah dibentuk, PMT ibu hamil, PMT ibu menyusui, pembinaan

	Donokerto Turi Sleman Yogyakarta	tuti, Yulian Agus Suminar			kader-kader di desa-desa, rembuk <i>stunting</i> , melengkapi fasilitas posyandu untuk kegiatan penanganan <i>stunting</i> dan telah berjalan dengan baik.
5	Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mengatasi <i>Stunting</i> Di Desa Batnes, Kecamatan Musi, Kabupaten Timor Tengah Utara	Arkhidemus Kono, Yakobus Kolne, Yohanes Imanuel Naif	2024	Kualitatif deskriptif	Kebijakan pemerintah desa dalam mengatasi <i>stunting</i> dengan menjalankan Program Makanan Tambahan (PMT) berkoordinasi dengan kader posyandu yang ada di Desa Batnes serta <i>launching</i> Pokja dan loka karya awal <i>roadmap</i> percepatan penurunan <i>stunting</i> .
6	Strategi Pemerintah Simeulue dalam Penanganan Prevalensi <i>Stunting</i> pada Anak Balita	Miri Susanti, Nellis Mardhi ah	2022	Kualitatif deskriptif	Strategi pemerintah dengan menguatkan peran dinas terkait melalui koordinasi lintas sektor dan membentuk 8 aksi konvergensi yang akan dilaksanakan yaitu Analisis Situasi, Rencana Kegiatan, Rembuk <i>Stunting</i> , Pembinaan KPM (Kader Pembangunan Manusia), Sistem Manajemen Data, Pengukuran dan Publikasi <i>Stunting</i> , serta Reviu Kinerja Tahunan
7	Collaborative Governance in Accelerating <i>Stunting</i> Reduction through <i>Corporate Social Responsibility</i>	Safira Hanny Rizky Wasiat, Roy Valiant Salomo	2024	Kualitatif	Percepatan penurunan <i>stunting</i> melalui <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) pada Program Ketapang Kuning (Ketahanan Pangan Keluarga Usir <i>Stunting</i> ) di Kelurahan Warakas, Jakarta Utara terbukti menurunkan angka <i>stunting</i> dari 19,3% di tahun 2021 menjadi 12% di tahun 2022.
8	Program Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Di Kota Madiun Sebagai Pemenuhan Hak Atas Kesehatan	Siska Diana Sari	2024	Normatif-Empiris	Melakukan program Warung Stop <i>Stunting</i> (WSS) dan Program B-BAAS (Bapak Bunda Asuh Anak <i>Stunting</i> ) serta mengeluarkan kebijakan Program Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dan Pembentukan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Kota Madiun
9	Strategi Pemerintah Desa Dalam Penanganan <i>Stunting</i> Berbasis Modal Sosial Di Desa Bilebante,	Saipul Hamdi, Dewi Satria Elmiana, Ikmal Maulana	2023	Kualitatif fenome nologi	Desa Bilebante berhasil menekan angka <i>stunting</i> secara signifikan dengan mengintegrasikan karakteristik dan modal sosial yang dimiliki masyarakatnya berupa budaya tutur dengan program -

	Lombok Tengah	,Nurul Haroma in,Ihfan Rahma wadi, Firdaus Abdul Malik			program atau kebijakan pemerintah dalam memerangi isu <i>stunting</i> .
10	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam Menanggulangi Masalah <i>Stunting</i>	Iren Ressie Ridua, Gloria Miagina Palako Djurubassa	2020	Kualitatif deskriptif	Program prioritas dalam pencegahan <i>stunting</i> melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat di puskesmas dan posyandu lewat pemberian Program Makanan Tambahan (PMT) kepada balita maupun ibu hamil, namun belum efektif.

## PEMBAHASAN

Hasil analisis *literature review* dari sepuluh jurnal berdasarkan data dari tabel 2. adalah sebagai berikut:

### 1. Analisis Faktor Keberhasilan

Berdasarkan analisis daerah yang berhasil menurunkan angka *stunting*, diantaranya memperhatikan faktor-faktor berikut :

#### 1) Masalah sosial

Sebagaimana yang dilakukan Kabupaten Banjar dalam memformulasikan kebijakan pencegahan *stunting* dengan berbasis responsif gender dan berhasil menurunkan angka *stunting* dari angka 40,2% di tahun 2021 menjadi sebesar 26,40% (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022). Kebijakan berbasis responsif gender tersebut dipilih dikarenakan mempertimbangkan bahwa salah satu faktor utama penyebab *stunting* yang terjadi di sebagian besar desa di wilayah Kabupaten Banjar adalah faktor ketidaksetaraan gender (Gulo, 2023).

#### 2) Integrasi Multisektor

Misalnya Program Ketapang Kuning (Ketahanan Pangan Keluarga Usir *Stunting*) Di Kelurahan Warakas sebagai upaya percepatan penurunan *stunting* melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat. Konsep ini berhasil menurunkan angka *stunting* di dari angka 19,3% di tahun 2021 menjadi 12% pada tahun 2022 (Wasiat & Salomo, 2024).

Hal ini selaras dengan teori keberhasilan implementasi model Pressman & Wildavsky (1973) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dapat berhasil apabila organisasi-organisasi dan departemen pada pada tingkat lokal yang terlibat dapat berperan dengan baik, sehingga diperlukan kerjasama, koordinasi, dan kontrol terhadap peranan masing-masing.

### 3) Modal Sosial

Sebagaimana Desa Bilebante di Lombok Tengah yang berhasil menurunkan angka *stunting* dari 23% menjadi hanya 3,15% dalam waktu tiga tahun. Keberhasilan ini dikarenakan formulasi kebijakan pemerintah desa dengan mengintegrasikan karakteristik dan modal sosial berupa budaya tutur dengan penerapan program-program dalam kebijakan memerangi isu *stunting* pada masyarakatnya. Selain itu juga didukung oleh sikap masyarakat yang kolaboratif serta peran aktif berbagai stakeholder (Hamdi, dkk, 2023).

### 4) Penetapan Regulasi & Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*

Sebagaimana dilakukan di Desa Batnes dengan *launching* Kelompok Kerja (Pokja) dan loka karya awal *roadmap* percepatan penurunan *stunting* (Kono, dkk, 2024). Hal serupa dilakukan pula di Kota Madiun dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 440-401.103/165/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Madiun Nomor : 401.103/63/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Madiun, dibentuknya Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Madiun tingkat Kecamatan, serta Peraturan Walikota Madiun Nomor : 65 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Kebijakan ini berperan penting dalam penurunan angka *stunting* Kota Madiun dari angka 12,4% di tahun 2021 menjadi 9,7% di tahun 2022 (Sari, 2024).

### 5) Potensi Lokal

Sebagaimana penelitian di Provinsi Kalimantan Selatan yang direkomendasikan oleh peneliti untuk memformulasikan kebijakan pencegahan *stunting* berbasis potensi pertanian. Hal ini mempertimbangkan potensi lahan basah serta mata pencaharian

penduduk yang sebagian besar berprofesi sebagai petani (Akbar, 2023). Hal ini menjadi rekomendasi yang relevan untuk diterapkan karena sektor pertanian berperan dalam memberikan nutrisi yang cukup dan berkualitas kepada masyarakat, terutama anak-anak, guna mencegah *stunting*.

Selain daripada lima faktor utama di atas, perumusan kebijakan yang berfokus pada program-program posyandu juga penting dilakukan. Sebab Posyandu merupakan lembaga yang dapat berperan penting dan menekankan jumlah *stunting* pada anak (Sewa, dkk, 2019). Misalnya penyuluhan oleh kader-kader posyandu, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ibu hamil dan menyusui, pembinaan kader-kader di desa-desa, rembuk *stunting*, dan melengkapi fasilitas posyandu (Purwanti, dkk, 2022).

## 2. Analisis Faktor Kegagalan

Berdasarkan daerah yang belum optimal dalam pencegahan dan penanggulangan *stunting*, diperoleh faktor penyebab sebagai berikut :

### 1) Pelaksanaan Program Belum Terpusat

Sebagaimana kota Padang yang belum optimal dalam mengimplementasikan konvergensi kebijakan pencegahan *stunting* disebabkan belum dibentuknya gugus tugas pencegahan *stunting*. Hal ini dikarenakan kota Padang belum menjadi lokus *stunting*. Akibatnya, OPD se-lingkungan pemerintah kota Padang melakukan evaluasi untuk program masing-masing saja, bukan evaluasi khusus *stunting* secara terpusat dari seluruh OPD terlibat (Iqbal & Yusran, 2021).

Kegagalan koordinasi antar-sektor di Kota Padang yang disebabkan oleh tidak adanya mekanisme evaluasi terpusat, sesuai dengan teori kegagalan koordinasi oleh Pressman & Wildavsky (1973).

### 2) Kurangnya Koordinasi Stakeholder Terkait

Sebagaimana permasalahan di Kabupaten Halmahera Timur dikarenakan kurangnya peran aktif dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan tenaga kesehatan yakni puskesmas dan kader posyandu. Hal ini diantaranya menyebabkan belum terselenggaranya

beberapa program kesehatan di Kabupaten Halmahera Timur, seperti promosi kesehatan, kampanye hidup sehat, dan sosialisasi tentang bahaya stunting di kecamatan khususnya di masing-masing desa (Ridua & Djurubassa, 2020). Peran stakeholder yang terbatas memerlukan optimalisasi peran stakeholder melalui proses koordinasi dan konsolidasi (Indarti, 2019).

### 3) Terbatasnya Ketersediaan Dana

Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan penanganan stunting di Kalurahan Donokerto. Sebagaimana diketahui berdasarkan data dari Kementerian PPN/Bappenas (2018) bahwa untuk menurunkan kasus *stunting* membutuhkan anggaran yang jumlahnya relatif besar, seperti untuk pembangunan, perbaikan fasilitas akses air bersih, sanitasi dan fasilitas kesehatan (puskesmas, pusyandu). Maka penguatan program pendanaan berbasis program tepat guna perlu dipertajam.

## 3. Perbandingan Hasil Studi dengan Negara Lain

Berdasarkan analisa dari hasil *literature review*, diperoleh lima faktor utama yang harus diperhatikan dalam menentukan keberhasilan perumusan kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting di Indonesia, yaitu Masalah Sosial, Integrasi Multisektor, Modal Sosial, Penetapan Regulasi & Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*, serta Potensi Lokal. Apabila dibandingkan dengan negara lain, misalnya di Ghana dimana pengurangan stunting melalui peningkatan intervensi gizi spesifik berkualitas tinggi dan investasi yang lebih besar di sektor medis dan non medis (Otoo, et al., 2025) serta pendekatan multisektoral untuk mengurangi angka stunting di Nigeria (Orimadegun, et al., 2025), negara Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tersebut dilatarbelakangi oleh karakteristik negara Indonesia sebagai negara asia dengan beragam budaya sekaligus negara agraris dengan sumber daya alam melimpah. Dua karakteristik tersebut menyebabkan modal sosial dan potensi lokal sebagai faktor yang ikut mendukung keberhasilan dalam formulasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting di Indonesia pada khususnya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan sepuluh jurnal yang telah peneliti analisis di atas, pada prinsipnya implikasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting di Indonesia telah menunjukkan keberhasilan di beberapa daerah. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam mengatasi masalah sosial, memanfaatkan modal sosial, potensi lokal, serta kemampuan koordinasi lintas sektor yang baik. Namun hambatan seperti pelaksanaan program belum terpusat, kurangnya koordinasi stakeholder terkait, serta kendala ketersediaan dana masih menjadi permasalahan di beberapa daerah yang harus segera dituntaskan. Koordinasi yang solid dan berkesinambungan antar sektor terkait yakni antara pemerintah, masyarakat, dan swasta menjadi kunci utama yang menentukan keberhasilan formulasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Indonesia.

### **Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Agar daerah yang belum berhasil menurunkan angka stunting dapat mencermati dan mengadopsi formulasi kebijakan yang telah diterapkan oleh daerah yang terbukti dalam menurunkan angka stunting sebagaimana data di atas. Pemerintah dalam hal ini berperan besar dalam rangka perumusan kebijakan sampai dengan tahap implementasi.
2. Pada tahap perumusan kebijakan, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan berbasis potensi lokal dalam perencanaan anggaran. Hal ini sebagai bentuk penguatan program pendanaan berbasis program tepat guna dalam rangka menyiasati keterbatasan dana.
3. Pada tahap implementasi kebijakan, peningkatan pelayanan kesehatan misalnya pelatihan kader posyandu juga harus diperkuat dengan modul berbasis budaya lokal. Hal ini akan memudahkan para kader dalam mengedukasi masyarakat setempat terkait gizi dan kesehatan.
4. Sedangkan pada tahap evaluasi kebijakan, pemerintah daerah setempat perlu mengintervensi kembali pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan stunting yang belum terpusat serta peningkatan

maupun perubahan regulasi terkait jika memang diperlukan. Dalam ketiga tahapan tersebut harus didukung dengan koordinasi lintas sektor yang erat dan berkesinambungan antara pemerintah daerah, pihak swasta, sektor kesehatan, hingga masyarakat lokal.

## DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, S. 2023. Kajian Teoritis: Formulasi Kebijakan Potensi Pertanian dalam Pencegahan Stunting di Kalimantan Selatan. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik*, (Online), Jilid 11, No. 2, (<https://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma/article/view/10358>), diakses pada 27 Desember 2024.
- Dunn, W. N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gulo, Y. T. M. 2023. Formulasi Model Pemberdayaan Perempuan dalam Mendukung Kebijakan Pencegahan Stunting Berbasis Responsif Gender di Kabupaten Banjar. *Jurnal Administrasi Publik*, (Online), Jilid 11, No 2, (<https://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma/article/view/10637>), diakses pada 27 Desember 2024.
- Hamdi, S., Elmiana, D. S., Maulana, I., Haromain, N., Rahmawadi, I., & Malik, F. A. 2023. Strategi Pemerintah Desa dalam Penanganan Stunting Berbasis Modal Sosial di Desa Bilebante, Lombok Tengah. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, (Online), Jilid 18, Nomor 2, (<http://www.jkpjournal.com/index.php/menu/article/view/346>), diakses pada 27 Desember 2024.
- Indarti, S. (2019). Analisis Stakeholders Dalam Kebijakan Program Dana Bergulir (PDB) Samisake Di Kota Bengkulu. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik*, 1(1), 1-15. <https://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP/article/view/4494>
- Iqbal, M., & Yusran, R. 2021. Upaya Konvergensi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*, (Online), Jilid 3, Nomor 2, (<https://www.neliti.com/publications/346890/upaya-konvergensi-kebijakan-pencegahan-stunting-di-kota-padang>), diakses pada 27 Desember 2024.
- Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. 2022. Faktor-faktor Penyebab Kejadian Stunting pada Balita. Diakses pada 03 Januari, 2024, dari: [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/1529/faktor-faktor-penyebab-kejadianstunting-pada-balita](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1529/faktor-faktor-penyebab-kejadianstunting-pada-balita).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016. Situasi Balita Pendek. Diakses pada 03 Januari, 2024, dari: <https://doi.org/10.1145/379277.312726>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2022. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. Diakses pada 07 Januari, 2024, dari: [https://ayosehat.kemkes.go.id/pub/files/files46531.\\_MATERI\\_KABKPK\\_SO\\_S\\_SSGI.pdf](https://ayosehat.kemkes.go.id/pub/files/files46531._MATERI_KABKPK_SO_S_SSGI.pdf).

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2022. *Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2024. *Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 Tematik*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2018. *Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota, Rencana Aksi Nasional dalam Rangka Penurunan Stunting; Rembuk Stunting*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Khotimah, K. (2022). Dampak stunting dalam perekonomian di Indonesia. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 2(1), 113-132.
- Kono, A., Kolne, Y., & Naif, Y. I. 2024. Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Stunting Di Desa Batnes, Kecamatan Musi, Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Poros Politik*, (Online), Jilid 6, Nomor 1, (<https://jurnal.unimor.ac.id/index.php/JPP/article/download/3406/1851>), diakses pada 27 Desember 2024.
- Nirmalasari, N. O. 2020. Stunting pada anak: Penyebab dan faktor risiko stunting di Indonesia. *Qawwam*, (Online), Jilid 14, Nomor 1, (<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/view/2372>), diakses pada 03 Januari 2024.
- Nurany, F., Ghozalyfah, C. N., Dian, F. R., Iqbal, F., Machbubah, D., & Della Amanda, L. Analisis Faktor-Faktor Dampak Bahaya Stunting di Kawasan Masjid Al Akbar Surabaya, (<https://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP/article/view/5545/3510>).
- Orimadegun, A. E., Jegede, A. S., Gaffey, M. F., Olufadewa, I., Confreda, E., Somaskandan, A., ... & Bhutta, Z. A. (2025). A mixed-methods study of the drivers of stunting reduction among children under five in Nigeria, 2008–2018. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 121, S86-S94. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002916525000905>
- Otoo, G. E., Gaffey, M. F., Confreda, E., Somaskandan, A., Islam, M., Kyei-Arthur, F., ... & Adu-Afarwuah, S. (2025). A mixed-methods study of the drivers of stunting reduction among children under-5 in Ghana, 2003–2017. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 121, S95-S105, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002916525000796>
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*. 2021. Jakarta : Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Purwanti, A. R., Widyastuti, T. M., & Suminar, Y. A. 2022. Kebijakan Pencegahan Dan Strategi Penanganan Stunting Di Kalurahan Donokerto Turi Sleman Yogyakarta. *Jurnal kewarganegaraan*, (Online), Jilid 6, Nomor 1, ([https://repository.upy.ac.id/6733/1/Jurnal\\_stunting.pdf](https://repository.upy.ac.id/6733/1/Jurnal_stunting.pdf)), diakses pada 27 Desember 2024.
- Ridua, I. R., & Djurubassa, G. M. 2020. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Dalam Menanggulangi Masalah Stunting. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, (Online), Jilid 2, Nomor 2, (<https://jurnal.amikom.ac.id/index.php/jspg/article/view/193>), diakses pada 27 Desember 2024.
- Sari, S. D. 2024. Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Madiun Sebagai Pemenuhan Hak Atas Kesehatan. *Jurnal Bedah Hukum*, (Online),

- Jilid 8, Nomor 1, (<https://ejournal.uby.ac.id/index.php/jbh/article/view/1316>), diakses pada 27 Desember 2024.
- Sewa, R., Tumurang, M., & Boky, H. (2019). Pengaruh promosi kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap dengan tindakan pencegahan stunting oleh kader posyandu di wilayah kerja Puskesmas Bailang Kota Manado. *KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi*, 8(4). (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/23968>), diakses pada 06 Agustus 2025.
- Snyder, H. 2019. 'Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines'. *Journal of Business Research*, (Online), Jilid 104, (<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.), diakses pada 27 Desember 2024.
- Susanti, M., & Mardhiah, N. 2022. Strategi Pemerintah Simeulue dalam Penanganan Prevalensi Stunting pada Anak Balita. *Journal of Social and Policy Issues*, (Online), ), Jilid 2, Nomor 1, (<http://journal.pencerah.org/index.php/jspi/article/view/32>), diakses pada 27 Desember 2024.
- Wasiat, S. H. R., & Salomo, R. V. 2024. Collaborative Governance in Accelerating Stunting Reduction through Corporate Social Responsibility. *Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora*, (Online), Jilid 8, Nomor 1, (<https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhe/article/view/3948>), diakses pada 27 Desember 2024.
- WHO. 2023. *Global Nutrition Report 2023*. Geneva: *World Health Organization*.